



CALON PEMEGANG KMS 2017 MULAI DIJARING Masyarakat Dilibatkan Pemetaan Keluarga Miskin

YOGYA (KR) - Sesuai mekanisme pendataan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, bulan ini Pemkot Yogyakarta mulai menjaring calon pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) 2017. Masyarakat terutama perangkat RT dan RW pun turut dilibatkan untuk memetakan keluarga miskin yang dinilai layak mendapatkan jaminan.

Pelibatan unsur masyarakat secara aktif tersebut juga selalu dilakukan dalam proses penjaringan tahun-tahun sebelumnya. "Surat edaran ke wilayah sudah disiapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Usulan dari masyarakat sangat kami butuhkan karena data KMS harus faktual," ungkap Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Tri Maryatun, Jumat (4/3).

Pemetaan serta pendataan terhadap warga yang layak memperoleh KMS itu pun akan dilakukan hingga April. Selanjutnya pada Mei digelar uji publik tahap pertama guna membeberkan seluruh hasil masukan dari masyarakat. Selama uji publik tersebut, jika masih ada warga miskin yang belum diusulkan, masih bisa diusulkan kemudian.

Usulan tambahan terhadap warga yang masih tercecer dibatasi hingga Juli. Pasalnya, pada periode tersebut, petugas verifikasi sudah melakukan proses pengolahan data. Terutama untuk mencocokkan dengan parameter yang sudah ditetapkan. "Proses pendataan memakan waktu panjang karena petugas harus bertemu satu persatu warga yang masuk dalam usulan. Nanti sistem yang akan menentukan, layak atau tidak. Jika sesuai parameter, otomatis bisa ditetapkan

sebagai calon pemegang KMS 2017," paparnya.

Terkait parameter, Dinsosnakertrans masih akan menggunakan sesuai Keputusan Walikota (Kepwal) tahun 2012. Namun jika dalam perjalanan ada perubahan parameter atau diterbitkan Kepwal yang baru, maka pihaknya juga akan menyesuaikan. Berdasarkan parameter sebelumnya, batasan keluarga atau penduduk yang berhak memegang KMS ialah memiliki bobot penilaian di atas 31.

Pemeringkatan bobot tersebut terbagi dalam tujuh aspek yakni pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan sosial. Misalnya untuk bobot pendapatan dan aset, akan dilihat dari pendapatan rata-rata keluarga perbulan, kepemilikan bangunan, serta tagihan listrik perbulan. **(Dhi)-k**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005